

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. UMKM dikenal sebagai tulang punggung perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat struktur perekonomian lokal. Namun demikian, di tengah dinamika persaingan pasar dan tantangan ekonomi makro, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari tingginya angka penarikan, stagnasi, bahkan kebangkrutan usaha yang terjadi setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut Alpajar et al. 2026 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam penelitian oleh Chaidir et al. (2026), terdapat sekitar 65,1 juta unit UMKM yang beroperasi di Indonesia. Paparan dari Novelika & Ridlwan 2026 sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Saputra & Kusuma (2024) menyatakan bahwa UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Sekitar 70% UMKM masih beroperasi secara informal dengan minim pencatatan keuangan, lemahnya manajemen usaha,

dan tingkat literasi keuangan yang rendah (Saputra & Kusuma, 2024). Dari et al. (2022) bahwa lebih dari 60% UMKM mengalami kesulitan bertahan lebih dari lima tahun karena lemahnya struktur keuangan internal dan kurangnya praktik pengelolaan usaha yang baik.

Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, menampung lebih dari 55% pelaku UMKM di Indonesia (Budiandriani et al., 2024). Banyak pelaku usaha di wilayah ini masih menjalankan kegiatan bisnis secara tradisional tanpa pencatatan transaksi, serta bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal. Kondisi ini menyebabkan UMKM sulit menjadi bankable dan mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan resmi, termasuk perbankan syariah yang kini mulai berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi mikro (Putri & Pamikatsih, 2024).

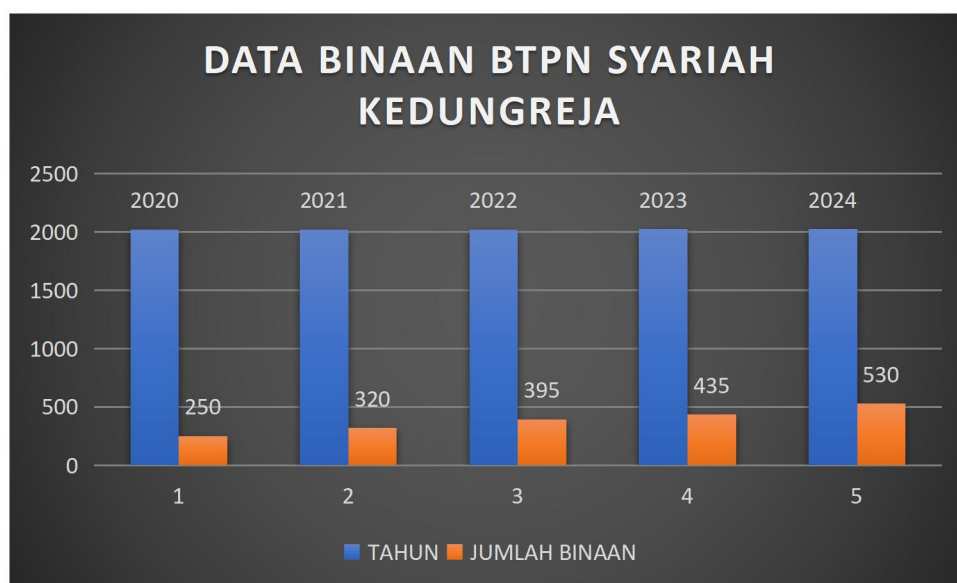
Temuan dari Irdawati & Nurlia 2026 menyebutkan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan populasi UMKM terbesar di Pulau Jawa. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah temuan penelitian dari Yuningsih et al. (2022), terdapat lebih dari 7,1 juta unit UMKM tersebar di 35 kabupaten/kota. Kota-kota seperti Semarang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Cilacap, dan Purwokerto menjadi pusat pertumbuhan UMKM. Lebih dari 90% UMKM di provinsi ini tergolong mikro dan belum memiliki sistem pengelolaan usaha yang memadai (Riwayanda & Saiful, 2024). Survei internal menunjukkan bahwa hanya 29% UMKM memiliki catatan keuangan sederhana, dan sekitar 18%

mampu membaca laporan laba rugi secara dasar. Kondisi ini berdampak pada kesalahan dalam pengelolaan modal, pengambilan keputusan yang kurang tepat, dan lemahnya keberlanjutan usaha (Pamikatsih & Fiardhani, 2024).

Wilayah selatan Jawa Tengah, seperti Kabupaten Cilacap, dikenal sebagai lumbung UMKM sektor rumah tangga dan pertanian olahan (Rokhimah et al., 2024). Data dari temuan Rokhimah et al. (2024) menyatakan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Cilacap mencatat sekitar 186.000 pelaku UMKM di wilayah ini. Permasalahan utamanya masih serupa: rendahnya literasi keuangan, keterbatasan pencatatan usaha, dan kurangnya akses pelatihan manajerial (Rokhimah et al., 2024). Survei tahun 2023 menunjukkan bahwa 68% UMKM tidak memisahkan keuangan usaha dan pribadi, dan lebih dari 60% belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi atau manajemen usaha dasar (Pasaribu et al., 2025).

Kecamatan Kedungreja adalah lokasi binaan BTPN Syariah, terdapat 168 pelaku UMKM aktif yang mayoritas adalah perempuan prasejahtera dengan skala usaha mikro (Kristiawati et al., 2024). Data BTPN Syariah pada awal tahun 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 63% pelaku usaha tidak melakukan pencatatan transaksi harian, dan 52% tidak memahami perbedaan antara modal dan keuntungan (Wirayasa & Yasa, 2023). Wawancara awal juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga,

sehingga perputaran modal usaha menjadi terganggu dan berisiko gagal bayar. Untuk memberikan gambaran lebih komprehensif terkait dinamika tersebut, berikut disajikan data kondisi UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja dalam lima tahun terakhir.



Gambar 1.1 Data Kondisi UMKM Binaan BTPN Syariah Kedungreja Tahun 2020–2024

Sumber: Arsip BTPN Syariah Tahun (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja meningkat setiap tahunnya, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tahun 2024 jumlah UMKM yang terdata menjadi binaan BTPN syariah berjumlah 530, dan angka ini akan mengalami peningkatan seiring nasabah yang bertambah, mayoritas UMKM yang menjadi Binaan masih mengalami kesulitan dalam aspek pengelolaan keuangan. Tingginya persentase pelaku usaha yang tidak

memiliki pencatatan transaksi harian dan belum memahami perbedaan antara modal dan keuntungan menandakan rendahnya tingkat literasi keuangan. Di sisi lain, peningkatan jumlah peserta pelatihan menunjukkan adanya potensi perbaikan, sebagaimana terlihat pada kenaikan omzet pasca pelatihan. Fakta ini memperkuat urgensi perlunya intervensi berbasis edukasi dan pendampingan keuangan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM binaan menunjukkan bahwa sebagian besar belum memahami cara menghitung laba bersih, tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta hanya mengandalkan ingatan dalam mencatat transaksi. Salah satu pelaku usaha makanan ringan, sebut saja Ibu R (42 tahun), mengaku mengalami kerugian akibat tidak mengetahui perputaran modal dan biaya produksi secara rinci. Ia menyatakan, “Saya belum pernah menulis pemasukan dan pengeluaran. Kadang kalau ditanya berapa untungnya, saya bingung jawabnya.”

UMKM yang telah mengikuti pelatihan keuangan cenderung menunjukkan performa usaha yang lebih baik dan stabil. Data BTPN Syariah menyebutkan bahwa rata-rata omzet pelaku usaha yang mengikuti pelatihan mengalami kenaikan sebesar 12% dalam enam bulan setelah pelatihan. Melihat kondisi tersebut, penting dilakukan kajian empiris mengenai pengaruh literasi keuangan, informasi akuntansi, dan modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM, khususnya pada kelompok binaan BTPN Syariah Kedungreja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas pelaku UMKM dari sisi internal dan menjadi dasar penyusunan strategi pemberdayaan yang relevan dan berkelanjutan. Sesuai dengan paparan yang ada dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik mengadakan kajian penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Informasi Akuntansi Dan Modal Usaha Terhadap Keberlanjutan Umkm Binaan Btpn Syariah Kedungreja”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan yang ada dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah untuk kajian penelitian ini ialah:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja?
2. Apakah informasi akuntansi berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja?
3. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja?
4. Apakah literasi keuangan, informasi akuntansi, dan modal usaha secara simultan berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan paparan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya kajian penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja.
2. Untuk mengetahui pengaruh informasi akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja.
3. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, informasi akuntansi, dan modal usaha secara simultan terhadap keberlanjutan UMKM binaan BTPN Syariah Kedungreja.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan paparan pada latar belakang, penelitian ini difokuskan pada ruang lingkup ekonomi mikro, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi binaan BTPN Syariah di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Penelitian ini mencakup tiga variabel utama, yaitu literasi keuangan, informasi akuntansi, dan modal usaha, yang dianalisis pengaruhnya terhadap keberlanjutan usaha UMKM.

Ruang lingkup penelitian secara geografis terbatas pada wilayah Kecamatan Kedungreja karena area ini merupakan lokasi binaan aktif BTPN Syariah dengan karakteristik pelaku usaha mayoritas perempuan prasejahtera berskala mikro. Penelitian ini juga mempertimbangkan data historis dan perkembangan UMKM binaan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) sebagai dasar evaluasi dan analisis.

Fokus penelitian diarahkan untuk menggambarkan kondisi aktual pengelolaan keuangan pelaku UMKM, termasuk pencatatan transaksi harian, pemahaman terhadap perbedaan modal dan keuntungan, hingga penggunaan pinjaman usaha. Penelitian ini juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas pelatihan literasi keuangan yang telah diberikan BTPN Syariah kepada UMKM binaannya, serta menilai bagaimana faktor-faktor internal tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha.

Penelitian ini tidak mencakup UMKM non-binaan atau UMKM yang berada di luar wilayah Kedungreja. Penekanan juga tidak diarahkan pada aspek eksternal seperti kebijakan makroekonomi atau dinamika pasar secara luas, tetapi lebih kepada faktor internal pengelolaan usaha oleh pelaku UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan poin-poin yang sudah dipaparkan diatas, maka manfaat yang diharapkan tercapai dari kajian penelitian yang diadakan ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan akuntansi UMKM. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait pengaruh literasi keuangan, informasi akuntansi, dan modal usaha terhadap

keberlanjutan UMKM, serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman pentingnya literasi keuangan, pencatatan informasi akuntansi yang baik, dan ketersediaan modal usaha dalam menjaga keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

b. Bagi BTPN Syariah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam merancang program pembinaan atau pemberdayaan yang lebih tepat sasaran bagi UMKM binaan, khususnya dalam aspek keuangan dan permodalan.

c. Bagi Pemerintah atau Pemangku Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan atau program penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan literasi keuangan, sistem akuntansi sederhana, dan akses terhadap permodalan yang adil dan inklusif.

